



SELUMA

RABU, 27 OKTOBER 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Beli Sawit Palsu Pakai Dana Desa

Inspektorat Turun Tangan

SELUMA - Belasan desa di Kabupaten Seluma diantaranya di Kecamatan Talo Kecil, Kecamatan Semidang Alas menggunakan dana desa (DD) untuk pengadaan bibit sawit palsu atau tidak sesuai standar. Dimana dalam kasus ini, Polda Bengkulu seminggu lalu telah menetapkan tiga tersangka.

Yakni MS, HH dan MS. Terkait hal ini Inspektorat Kabupaten Seluma akan menindak lanjuti adanya persoalan tersebut di lingkup Kabupaten Seluma. Inspektur Inspektorat Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA mengatakan, memang sudah ada koordinasi pihak Polda Bengkulu dengan Inspektorat terkait pengadaan bibit tersebut.

"Mereka minta pihaknya melakukan tindak lanjut dari pengembangan yang dilakukan oleh Polda Bengkulu bahwa ditemukan ada keterlibatan desa. Intinya kita siap jika diminta oleh Polda Bengkulu untuk melakukan audit," ujarnya.

Ia menjelaskan, audit yang dilakukan ada adalah audit dengan tujuan tertentu karena sesuai dengan permintaan dari Polda Bengkulu seperti apa. "Yang diminta audit dengan tujuan tertentu," terangnya.

Data terhimpun, Polda Bengkulu telah menetapkan tiga tersangka warga asal Provinsi Riau sebagai penyedia bibit sawit palsu yang dibeli oleh desa-desa di Kabupaten Seluma. Namun hasil pengembangan penyidik menemukan keterlibatan desa dalam pengadaan bibit tersebut. Hal ini ada dugaan penggelembungan harga yang dilakukan oleh desa dengan menggunakan dana desa (DD)

tahun 2021.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma Nopetri Elmanto, M.Si mengatakan, pihaknya akan mencari data desa mana saja yang terlibat pengadaan bibit sawit palsu tersebut karena saat pihaknya baru mendapatkan informasi namun Inspektort juga telah melakukan pemeriksaan. "Kita belum tau beberapa banyak desa yang terlibat, maka dari itu setelah ini akan kita lakukan pemanggilan," ujarnya.

Ditambahkannya, secara aturan memang dibolehkan tahun ada program padat karya tunai tetapi desa ini menyalakan gunakan regulasi tersebut. "Kalau aturan memang ada program padat karya tunai tapi kawan salah memartikan," sampainya.

(juu)